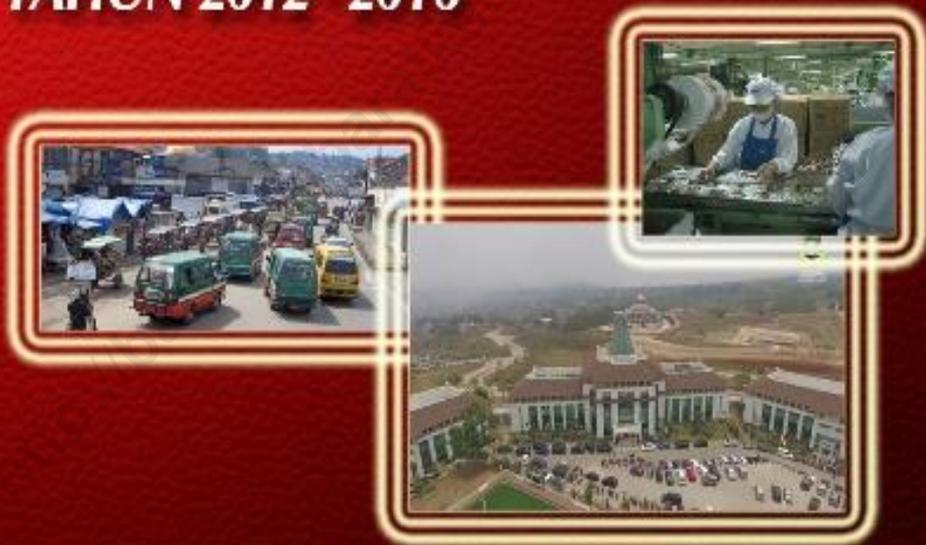


**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BANDUNG BARAT
MENURUT LAPANGAN USAHA**

TAHUN 2012 - 2016



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BANDUNG BARAT
MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2012 - 2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BANDUNG BARAT
MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2012-2016**

ISSN : -
Nomor Publikasi : 3217.1701
Katalog BPS : 9302008.3217
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiii + 112

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

Dicetakoleh :
CV. Nugraha

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 ini merupakan penerbitan kedua dengan tahun dasar 2010. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2012-2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pergeseran tahun dasar dari tahun 2000 ke tahun 2010 secara umum dimaksudkan untuk mengakomodir pergeseran struktur perekonomian. Disamping itu, pergeseran tahun dasar yang dilakukan sepuluh tahun sekali meningkatkan kualitas PDRB dan untuk memenuhi tuntutan Internasional sehingga datanya dapat diperbandingkan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Bandung Barat, 7 Agustus 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat



Sri Daty

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	lii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PENJELASAN TEKNIS	xi
BAB I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	3
1.3. Perubahan Tahun Dasar PDRB	4
1.4. Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010	7
BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	11
2.1. Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11
2.2. Kategori B: Pertambangan dan Penggalian	19
2.3. Kategori C: Industri Pengolahan	23
2.4. Kategori D: Pengadaan Listrik dan Gas	33
2.5. Kategori E: Pengadaan Air	36
2.6. Kategori F: Konstruksi	37
2.7. Kategori G: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	39
2.8. Kategori H: Transportasi dan Pergudangan	42
2.9. Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48
2.10. Kategori J: Informasi dan Komunikasi	51
2.11. Kategori K: Jasa Keuangan	53

	Halaman
2.12. Kategori L: Real Estat	66
2.13. Kategori M,N: Jasa Perusahaan	67
2.14. Kategori O: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	70
2.15. Kategori P: Jasa Pendidikan	71
2.16. Kategori Q: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72
2.17. Kategori R,S,T,U: Jasa Lainnya	73
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012-2016.....	78
3.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	78
3.2. Struktur Ekonomi	79
3.3. Pertumbuhan Ekonomi	84
3.4. PDRB Perkapita.....	87
BAB IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA	91
4.1. Kategori A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	91
4.2. Kategori B: Pertambangan dan Penggalian	92
4.3. Kategori C: Industri Pengolahan	92
4.4. Kategori D: Pengadaan Listrik dan Gas	93
4.5. Kategori E: Pengadaan Air	94
4.6. Kategori F: Konstruksi	94
4.7. Kategori G: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	95
4.8. Kategori H: Transportasi dan Pergudangan	95
4.9. Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96
4.10. Kategori J: Informasi dan Komunikasi	96

	Halaman
4.11. Kategori K: Jasa Keuangan	97
4.12. Kategori L: Real Estat	97
4.13. Kategori M,N: Jasa Perusahaan	98
4.14. Kategori O: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98
4.15. Kategori P: Jasa Pendidikan	99
4.16. Kategori Q: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100
4.17. Kategori R,S,T,U: Jasa Lainnya	100
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	8
Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	9
Tabel 1.3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	10
Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	78
Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2012-2016 (Juta Rupiah)	79
Tabel 3.3 Peranan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)	81
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Kategori Lapangan Usaha , 2012-2016 (Persen)	86
Tabel 3.5 PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat, 2012-2016	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Menurut Kategori Lapangan (persen), 2016	80
Gambar 3.2 Kontribusi Kelompok Lapangan Usaha Terhadap Perekonomian Kabupaten Bandung Barat (persen), 2012-2016 (Persen)	83
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Kabupaten Bandung Barat 2012-2016 (Persen)	84
Gambar 3.4 PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat, 2012-2016	88

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah), 2012-2016	103
Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2012-2016	104
Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016	105
Lampiran 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016	106
Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016	107
Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016	108
Lampiran 7 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2012-2016	109
Lampiran 8 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2012-2016	110

Lampiran 9 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional
Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut
Lapangan Usaha (2010=100), 2012-2016

.....

111

<http://bandungbaratkab.bps.go.id>
bandungbaratka.bps.go.id

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

- Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
 5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
 6. Output adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh lapangan usaha dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia di suatu wilayah (negara, provinsi, dan sebagainya) dalam suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun), tanpa memperhatikan asal-usul pelaku produksinya.

7. Upah/gaji adalah nilai tambah yang dibayarkan sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi tenaga kerja (termasuk di dalamnya imputasi upah dan gaji).

<http://bandungbaratkab.bps.go.id>
bandungbaratka.bps.go.id

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha peningkatan produktifitas melalui proses produksi dengan cara pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya ekonominya secara optimal guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999)

Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (*economic growth*). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainnya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*)

Dengan demikian pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan

hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Oleh sebab itu, perlu disajikan statistik PDRB secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Angka PDRB dan turunannya dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB

atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah dalam periode waktu tertentu yaitu biasanya setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- 1) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- 3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
- 5) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3. Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan PDRB Kabupaten/ Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

1.3.1. Pengertian System Of National Accounts (SNA 2008)

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan

aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

1.3.2. Manfaat Perubahan Tahun Dasar

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- 1) Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan kualitas data PDRB;
- 3) Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

1.3.3. Implikasi Perubahan Tahun Dasar.

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- 1) Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;

- 2) Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting.

1.3.4. Alasan Tahun 2010 sebagai tahun dasar

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- 1) Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- 2) Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- 3) Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ;
- 4) Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- 5) Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);

- 6) Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

1.4. Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- 1) Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*: Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- 2) Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)*
- 3) Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*) Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- 4) Klasifikasi : Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

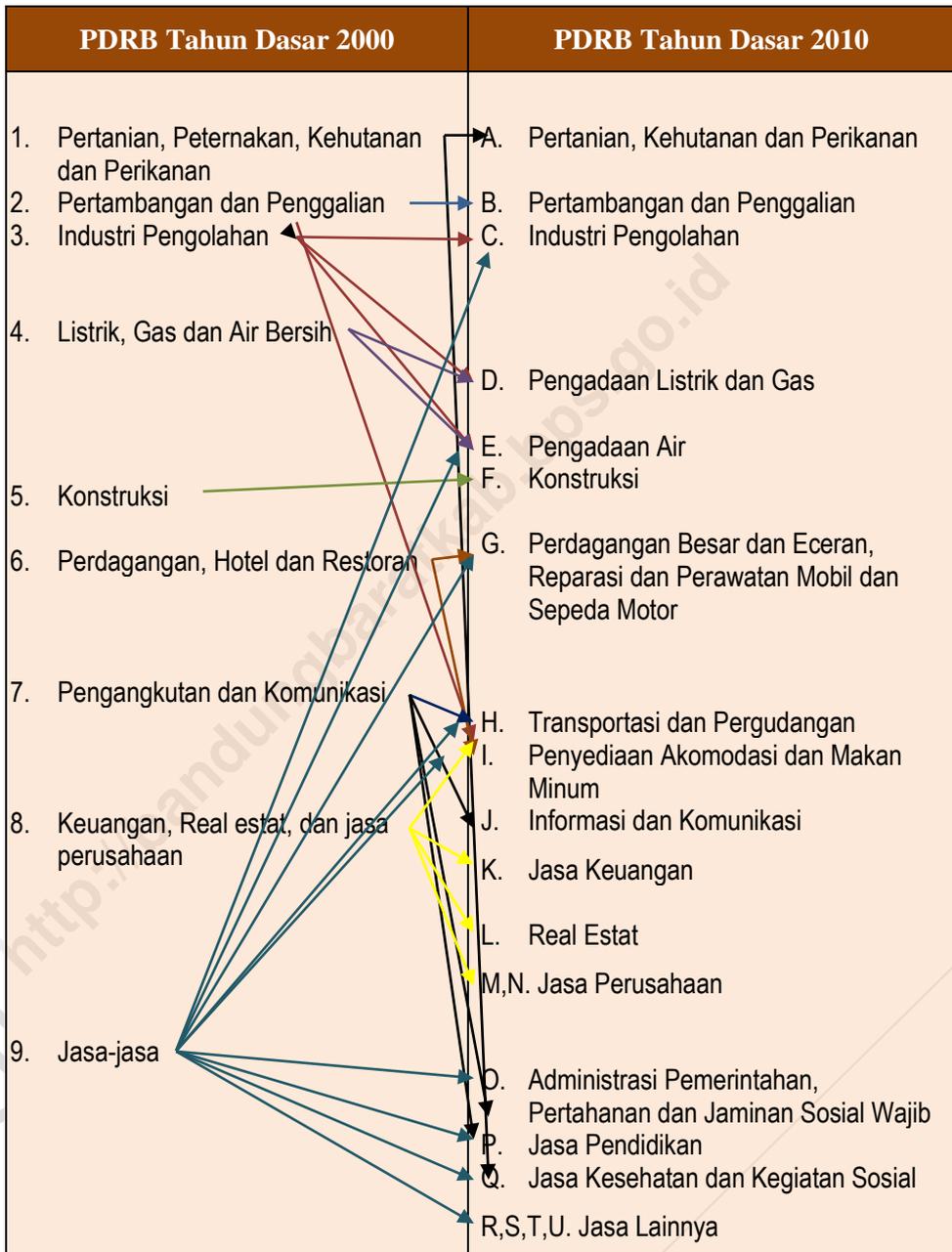
Tabel 1.1.
Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Valuasi	Harga Produsen	Harga Dasar
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

1.5. Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3.
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB
Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1. Kategori A: PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

1). Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll).

Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS.

Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

b. Tanaman Hortikultura

Subkategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman

hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman.

Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

c. Tanaman Perkebunan

Subkategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu,

tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

d. Peternakan

Subkategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga

berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam

kebudayaan binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2). Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan

hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

3). Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS.

Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008.

Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*.

Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapannya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*). Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2. Kategori B: PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

1). Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sub kategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan **adalah pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM dan Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Lap. Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas BPS.

Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2). Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyarangan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subsektor pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; Dinas Pendapatan Daerah.

3). Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

4). Pertambangan dan Penggalan Lainnya

Sub kategori ini mencakup penggalan dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu

marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas.

Termasuk dalam subsektor ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

2.3. Kategori C: INDUSTRI PENGOLAHAN

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

1). Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2). Industri Makanan dan Minuman

Industri Makanan dan Minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan.

Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

3). Industri Pengolahan Tembakau

Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

4). Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Sub kategori ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spreng, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain).

Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

5). Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

6). Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan.

Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16

7). Industri Kertas & Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subsektor ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama.

Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama.

Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekam mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Percetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

8). Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup

perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk.

Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi.

Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

9). Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang.

Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

10). Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni,

seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

11). Industri Logam Dasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

12). Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Golongan ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

13). Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus.

Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

14). Industri Alat Angkutan

Golongan pokok ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009 : kode 29 dan 30.

15). Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

16). Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Sub kategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Sub kategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Golongan pokok ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum.

Sub kategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi, BPS dengan kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran, BPS; sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas, BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP BPS RI

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara **revaluasi**, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan **ekstrapolasi** yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun.

Sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun.

Adapun untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan sub kategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4. Kategori D: PENGADAAN LISTRIK DAN GAS

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti,

termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

1). Ketenagalistrikan

Golongan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun.

Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

2). Pengadaan Gas dan Produksi Es

Golongan ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas.

Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan

dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan yang digunakan untuk seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun.

Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara **revaluasi**, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5. Kategori E: PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input

dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun.

Data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data: untuk data Produksi adalah Subdit.Statistik Pertambangan dan Energi - BPS, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS- BPS; Data Harga diperoleh dari Bidang Statistik Distribusi-BPS RI; Data Struktur Biayadiperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih – BPS.

2.6. Kategori F: KONSTRUKSI

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan

ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku sektor konstruksi adalah metode **ekstrapolasi** dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

2.7. Kategori G: PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi

atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

1). Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Sub kategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2). Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Sub kategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir *dalam* pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri.

Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-*deflate* menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

2.8. Kategori H: TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

1). Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu **pendekatan produksi**. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan

jalan rel dari Bidang Statistik Distribusi, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode ekstrapolasi** yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2). Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter/sewa* kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan **metode ekstrapolasi** dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lintas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkutan Motor RI (Perum DAMRI) dan

beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Bidang Statistik Distribusi, BPS.

3). Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan **metode ekstrapolasi**, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Bidang Statistik Distribusi, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

4). Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode ekstrapolasi**, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Bidang Statistik Distribusi, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia Ferry.

5). Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode ekstrapolasi**, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Bidang Statistik Distribusi, BPS.

6). Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan **metode deflasi**, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhandha Ghara Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Bidang Statistik Distribusi, BPS.

2.9. Kategori I: PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

1). Penyediaan Akomodasi

Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.

Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada

dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB sub kategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2). Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa

pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

2.10. Kategori J: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat

kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari

berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah **pendekatan produksi**. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan **metode deflasi**, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat perfilman Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan

telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Bidang Statistik Distribusi-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Bidang Statistik Distribusi-BPS.

2.11. Kategori K: JASA KEUANGAN DAN ASURANSI

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

1). Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa

lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya.

Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga.

Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya.

Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah

IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2). Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

a. Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

b. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik

Kuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

3). Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

a. Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai

Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

b. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. **Sewa guna usaha dengan hak opsi** mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. **Pembiayaan kartu kredit** mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. **Pembiayaan anjak piutang** mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga

konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

c. Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

4). Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

a. Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya.

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

b. Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI).

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

e. Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

f. Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

g. Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi

milik bertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **deflasi**, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.12. Kategori L: REAL ESTAT

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real esta adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13. Kategori M dan N: JASA PERUSAHAAN

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

a. Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

b. Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

c. Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur

pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

d. Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

e. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

f. Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

g. Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah **pendekatan produksi**. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode **revaluasi**. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.14. Kategori O: ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-

undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib.

Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara **ekstrapolasi**. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Badan Pusat Statistik; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15. Kategori P: JASA PENDIDIKAN

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan.

Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.16. Kategori Q: JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17. Kategori R, S, T, U: JASA LAINNYA

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

a. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah.

Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah

tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/ indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang Dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

b. Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

c. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan.

Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa

dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdit PEK (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang Dilakukam Direktorat Neraca Pengeluaran.

d. Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Customs Organization(WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries(OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Statistik Harga Konsumen.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012-2016

3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 37,08 trilyun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 26,92 trilyun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp 3,07 triliun dari Rp 34,01 trilyun atau meningkat sebesar 9,03 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan (Tahun 2010) yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1,43 trilyun dari Rp 25,49 trilyun atau meningkat sebesar 5,61 persen dari tahun sebelumnya.

**Tabel. 3.1 PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2016
(Trilyun Rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB Berlaku	24.14	27.38	30.68	34,01	37,08
PDRB Konstan	21.65	22.94	24.26	25,49	26,92

** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Perbandingan PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel. 3.2 PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2016 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	PDRB adh Berlaku		PDRB adh Konstan	
	2012	2016**	2012	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,596,944.0	5,187,604.0	3,193,260.2	3,543,508.6
B Pertambangan dan Penggalian	344,471.3	450,515.2	308,184.3	320,578.2
C Industri Pengolahan	9,490,945.5	14,642,303.7	8,594,751.8	10,705,583.8
D Pengadaan Listrik dan Gas	158,945.6	271,412.7	170,223.2	215,994.0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,056.1	13,868.9	8,375.5	10,066.8
F Konstruksi	1,776,011.5	2,847,880.5	1,500,653.2	1,963,510.4
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,425,043.0	5,247,814.0	3,017,460.5	3,885,035.9
H Transportasi dan Pergudangan	1,148,823.7	1,924,276.8	1,093,928.9	1,372,061.0
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,104,847.2	1,766,768.6	999,903.5	1,328,758.7
J Informasi dan Komunikasi	430,345.1	642,327.5	411,837.7	609,398.1
K Jasa Keuangan dan Asuransi	182,222.2	312,741.4	164,166.9	228,163.1
L Real Estat	427,471.4	632,120.6	384,019.9	483,839.3
M,N Jasa Perusahaan	99,795.8	165,082.6	91,642.0	122,253.4
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842,711.6	1,143,752.2	728,087.5	747,970.4
P Jasa Pendidikan	774,662.6	1,269,217.5	684,448.9	967,753.5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,316.1	183,034.4	94,314.5	135,936.9
R,S,T,U Jasa lainnya	228,725.5	383,398.4	206,620.4	282,221.2
Produk Domestik Regional Bruto	24,144,338.2	37,084,119.0	21,651,878.9	26,922,633.3

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kemudian diikuti oleh kategori (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (14,15 persen); kategori (A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,99 persen); kategori (F) Konstruksi (7,68 persen); kategori (H) Transportasi dan Pergudangan (5,19 persen) dan kategori (I) Penyediaan akomodasi dan makan (4,76 persen). Sementara peranan kategori lainnya di bawah 4 persen.

Tabel. 3.3 Peranan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2012 – 2016 (persen).

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.90	14.73	14.59	13.65	13.99
B	Pertambangan dan Penggalian	1.43	1.40	1.36	1.29	1.21
C	Industri Pengolahan	39.31	38.93	39.10	39.34	39.48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.66	0.56	0.59	0.66	0.73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	7.36	7.59	7.70	7.86	7.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.19	14.67	14.46	14.33	14.15
H	Transportasi dan Pergudangan	4.76	4.89	4.96	5.39	5.19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.58	4.52	4.59	4.68	4.76
J	Informasi dan Komunikasi	1.78	1.71	1.69	1.70	1.73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.75	0.82	0.80	0.83	0.84
L	Real Estat	1.77	1.76	1.75	1.72	1.70
M,N	Jasa Perusahaan	0.41	0.42	0.42	0.43	0.45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.49	3.39	3.19	3.19	3.08
P	Jasa Pendidikan	3.21	3.18	3.32	3.41	3.42

PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016 **
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q	Jasa Pendidikan	0.43	0.43	0.45	0.47	0.49
R,S,T,U	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.95	0.97	0.99	1.00	1.03
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Struktur perekonomian suatu daerah dapat juga dilihat dari distribusi persentase PDRB kelompok kategori lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Selama periode 2012-2016, Kelompok lapangan usaha sekunder masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh kategori Industri Pengolahan.

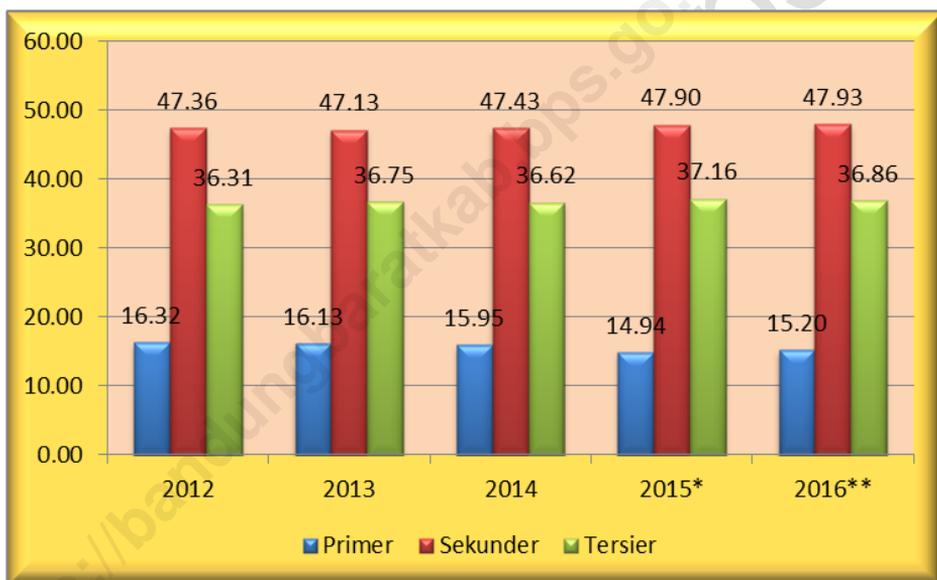
Kontribusi kelompok ini cenderung mengalami peningkatan, meski pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan kontribusi. Pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 47,93 persen. Sedangkan untuk kelompok primer kontribusinya terus mengalami penurunan, dari 16,32 persen tahun 2012 hingga menjadi 14,94 persen pada tahun 2015, kemudian naik kembali pada tahun 2016 menjadi 15,20 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kelompok ini belum mampu bergerak secara signifikan dalam menggerakkan perekonomian dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok primer yang terdiri dari kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan sangat tergantung dengan kondisi alam. Fenomena yang terjadi terlihat bahwa semakin banyak lahan produktif yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan/bangunan lainnya. Sedangkan pada tahun 2016 mampu naik kembali walaupun relative kecil dikarenakan produktifitas pertanian yang semakin membaik.

Kontribusi kelompok sektor tersier terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 36,31 persen terus bergerak hingga menjadi 37,16 persen pada tahun 2015, namun kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 36,86 persen. Peningkatan kelompok ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan pola hidup dan kebutuhan dimana masyarakat Kabupaten Bandung Barat semakin besar kebutuhannya terhadap manfaat dari aktivitas kelompok tersier ini, antara lain perdagangan, transportasi dan telekomunikasi, keuangan dan jasa-jasa.

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa terjadi perkembangan tipe dan karakter wilayah dari karakter pedesaan yang sebelumnya digerakkan oleh kelompok primer menuju karakter perkotaan yang

kental dengan aktivitas kelompok kategori tersier. Namun, sebagai wilayah yang potensial dengan sumber daya alam, semestinya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat tetap harus menjaga dan mengembangkan potensi dari aktivitas kelompok lapangan usaha primer, khususnya pertanian.

Gambar 3.2. Kontribusi Kelompok Lapangan Usaha Terhadap Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2016 (Persen).



* Angka sementara ** Angka sangat sementara

3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2010. Perekonomian Bandung Barat pada tahun

2016 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Bandung Barat tahun 2016 mencapai 5,64 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,03 persen.

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2012 – 2016 (Persen)



* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada semua kelompok kategori. Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori pada tahun 2016 cukup bervariasi (Tabel 3.4.). Dengan variasi tersebut dapat kita bagi 3 (tiga) kelompok yaitu :

Kelompok pertama; LPE dibawah 4 persen ditunjukkan oleh kategori pertambangan dan penggalian (1,72 persen) dan kategori

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,12 persen).

Kelompok kedua; LPE berkisar 4 sampai 8 persen ditunjukkan oleh kategori konstruksi (4,38 persen); kategori industri pengolahan (5,49 persen); kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,53 persen); kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (5,68 persen); kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan (5,69 persen); kategori jasa pendidikan (5,85 persen); kategori transportasi dan pergudangan (6,07 persen); kategori pengadaan listrik dan gas (6,51 persen); kategori real estat (6,60 persen); kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (7,14 persen); dan kategori jasa lainnya (7,75 persen).

Kelompok ketiga : LPE diatas 8 persen, ditunjukkan oleh kategori jasa perusahaan (8,11 persen); kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (8,21 persen); kategori jasa keuangan dan asuransi (8,62 persen); kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,52 persen); dan kategori informasi dan komunikasi (10,97 persen).

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Kategori Lapangan Usaha , 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.95	4.06	3.09	(2.13)	5.69
B	Pertambangan dan Penggalian	1.75	0.64	3.26	(1.60)	1.72
C	Industri Pengolahan	6.26	5.62	5.76	5.70	5.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.02	6.83	7.81	3.44	6.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.71	6.84	1.21	5.33	5.53
F	Konstruksi	9.25	7.92	8.03	7.52	4.38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.24	7.84	7.44	5.15	5.68
H	Transportasi dan Pergudangan	4.21	4.21	4.15	8.95	6.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.89	7.61	7.24	7.47	7.14
J	Informasi dan Komunikasi	5.83	8.18	9.86	12.20	10.97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.09	11.43	6.10	8.63	8.21
L	Real Estat	4.83	5.97	5.88	5.34	6.60
M,N	Jasa Perusahaan	6.96	7.01	6.23	8.55	8.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.83	0.20	(1.05)	2.46	1.12
P	Jasa Pendidikan	11.18	10.47	10.13	9.79	5.85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.03	9.75	8.12	10.91	9.52
R,S, T,U	Jasa lainnya	9.16	7.84	8.27	8.57	7.75
Produk Domestik Regional Bruto		6.04	5.94	5.79	5.03	5.64

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Apabila dicermati pertumbuhan sektor *non-tradable* (yang tidak dapat diperdagangkan) seperti sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor keuangan, jasa menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun sektor *tradable* (pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan) menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif rendah atau dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara total.

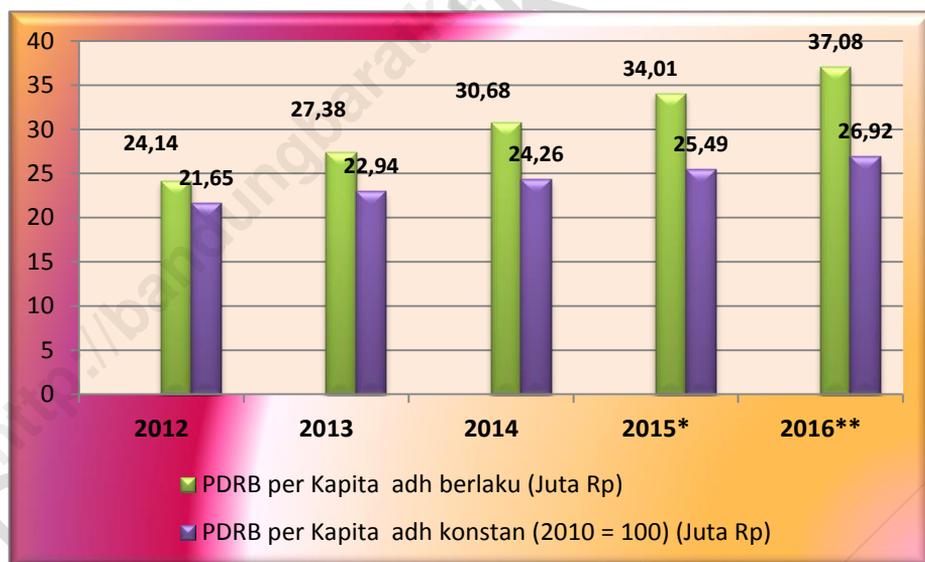
Ketimpangan pertumbuhan sektor *tradable* dan *non tradable* ini memiliki implikasi yang serius terkait dengan surplus ekonomi dan pemerataan. Sektor *non tradable* bersifat padat modal, teknologi dan pengetahuan. Sebaliknya sektor *non tradable* bersifat padat karya, sehingga sektor ini jika mampu tumbuh lebih baik akan memberi dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meski secara kontribusi, peranan sektor industri masih memegang peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015, yaitu sebesar lebih dari 39 persen. Sebagai konsekuensinya arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

3.4. PDRB Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita

atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan *proxy* PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Gambar 3.4. PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)



* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal.

PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu 2011 - 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. PDRB per kapita/tahun atas dasar berlaku Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 sampai dengan 2015 masing-masing sebesar 13,81 juta rupiah, 15,40 juta rupiah, 17,24 juta rupiah, 19,05 juta rupiah dan 20,85 juta rupiah.

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai 9,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Tabel 3.5. PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	24,144,339	27,382,964	30,679,997	34,009,662	37,084,119
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	21,651,879	22,937,169	24,264,922	25,486,171	26,922,633
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	1,567,398	1,588,781	1,609,512	1,629,423	1,648,387
PDRB per Kapita adh berlaku (Juta Rp)	15.40	17.24	19.06	20.87	22.50
PDRB per Kapita adh konstan (2010 = 100) (Juta Rp)	13.81	14.44	15.08	15.64	16.33
LPE PDRB per Kapita adh berlaku (%)	11.55	11.89	10.60	9.50	7.79
LPE PDRB per Kapita adh konstan (2010 = 100) (%)	4.53	4.51	4.43	3.75	4.42

** Angka sementara, ** Angka sangat sementara*

Sedangkan PDRB perkapita atas dasar konstan 2010 yang menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 sampai dengan 2015 terus menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 13,22 juta rupiah, 13,81 juta rupiah, 14,44 juta rupiah dan 15,06 juta rupiah dan 15,64 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan relatif stabil berkisar 3 – 4,5 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan mencapai 3,82 persen, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,34 persen.

BAB IV

PERKEMBANGAN PDRB MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA

PDRB Kabupaten Bandung Barat menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap Katergori lapangan usaha diuraikan di bawah ini

4.1. Katergori A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Pada tahun 2016 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,99 persen. Pada tahun 2012 kontribusi kategori ini mencapai 14,90 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Dari laju pertumbuhan ekonomi, tahun 2016 mengalami percepatan sebesar 5,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 kategori ini mengalami percepatan sebesar 1,95 persen, dan terjadi percepatan kembali pada tahun 2016 sebesar 5,69 persen. PDRB kategori yang dibangun oleh aktivitas ekonomi sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian ; sub kategori kehutanan dan penebangan kayu; dan sub kategori perikanan memang sangat tergantung dengan kondisi alam. Fenomena yang terjadi di lapangan, terlihat ada kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan produktif

(sawah) menjadi wilayah perumahan pada beberapa wilayah.

Namun demikian, potensi wilayah lahan yang masih cukup luas terutama untuk tanaman pangan, horikultura dan peternakan harus tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan menjadi agribisnis yang memiliki nilai tambah yang lebih besar. Demikian juga dengan potensi perikanan, terutama pada wilayah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan waduk saguling memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk ditumbuhkembangkan.

4.2. Kategori B: Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 adalah sebesar 1,21 persen. Kontribusi kategori ini relatif stabil selama periode 5 tahun terakhir, namun pertumbuhan ekonominya relatif berfluktuasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan sebesar 1,60 namun kembali mengalami percepatan pada tahun 2016 sebesar 1,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan ekonomi yang potensi adalah kegiatan penggalian baik berupa produksi pasir, batu dan sejenisnya.

4.5.3. Kategori C: Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan merupakan kategori yang menjadi *engine of growth* perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Dengan kontribusi sebesar 39,48 persen terhadap pembentukan PDRB tahun 2016, kategori lapangan usaha ini memberi andil yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, selain kategori lapangan usaha

pertanian. Nilai tambah aktivitas ekonomi industri pengolahan ini disumbang oleh nilai aktivitas berbagai kegiatan industri. Sebagai kontributor terbesar adalah sub kategori industri makanan/minuman dan sub kategori industri tekstil. Pelaku ekonomi sub kategori tersebut menyebar pada tingkat industri besar sedang maupun industri kecil dan mikro.

Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini sepanjang tahun 2012 – 2016 cenderung stabil. Pada tahun 2012 pertumbuhan 6,26 persen, tahun-tahun berikutnya menjadi 5,62 persen, 5,76 persen, 5,70 persen dan tahun 2016 mengalami percepatan menjadi 5,49 persen. Kinerja industri pengolahan masih relatif bagus, dengan melakukan efisiensi dan membidik pangsa pasar domestik. Kinerja kategori ini juga cukup disupport pendanaan oleh aktivitas perbankan, dimana kredit investasi modal perbankan yang dikucurkan pada kategori ini cukup besar.

4.4. Kategori D : Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,73 persen terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Laju pertumbuhan ekonomi kategori Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2016 adalah sebesar 6,51 persen. Laju pertumbuhan tahun ini mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,44 persen.

4.5. Kategori E : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat 2016 hanya sebesar 0,04 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya tahun 2012-2016 berfluktuatif, yaitu sebesar 6,71 persen, 6,84 persen, 1,21 persen, 5,33 persen dan tahun 2016 sam dengan tahun sebelumnya yaitu 5,33 persen.

4.6. Kategori F : Konstruksi

Pada tahun 2016 kategori konstruksi menyumbang sebesar 7,68 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bandung Barat, sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 7,86 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun-tahun di antaranya (2012-2015) yaitu sebesar berturut-turut 7,36 persen, 7,59 persen dan 7,70 persen dan 7,86 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Bandung Barat mengalami perlambatan dari 7,52 persen pada tahun 2015 menjadi 4,38 persen pada tahun 2016.

4.7. Kategori G: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 13 persen. Pada tahun 2015 kontribusi kategori ini sebesar 14,34 persen, andilnya terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 13,47 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,68 persen, atau mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kategori G ini merupakan salah satu leading sector untuk perekonomian Kabupaten Bandung Barat sehingga banyak masyarakat yang bekerja di sektor ini.

4.8. Kategori H : Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 5,19 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2016. Kontribusi kategori ini realtif meningkat, jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 5,13 persen. Diakui bahwa nilai tambah transportasi umum khususnya angkutan darat cenderung meningkat. Dengan perbaikan fasilitas angkutan umum yang notabene sebagai angkutan darat, menyebabkan meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum. Laju pertumbuhan kategori ini tahun 2016 mencapai 6,07 persen atau mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,95 persen.

4.9. Kategori I : Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat sebesar 4,76 persen dengan nilai sebesar 1,77 triliun. Kontribusi kategori ini mengalami tren yang meningkat selama periode 2012 – 2016. Tahun 2012, kontribusinya mencapai 4,58 persen dan tahun 2016 mencapai 4,76 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini sedikit mengalami perlambatan pada tahun 2016 yaitu mencapai 7,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,47 persen.

Kategori ini merupakan kategori yang potensial di Kabupaten Bandung Barat. Dengan sumber daya alam yang cukup menarik dan wilayah yang strategis terutama di wilayah Bandung Barat bagian utara, menjadi determinan terhadap aktivitas kategori ini.

4.10. Kategori J : Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1,70 persen menjadi 1,73 persen.

Laju pertumbuhannya menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 12,20 persen menjadi 10,97 persen.

Selama periode 2012 – 2016 laju pertumbuhan kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu di atas 8 persen, kecuali tahun 2016 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 10,97 persen. Aktivitas ekonomi kategori ini mengalami perluasan hingga ke wilayah pedesaan. Pemanfaatan alat komunikasi telepon seluler menjadi kebutuhan yang penting di seluruh lapisan masyarakat.

4.11. Kategori K : Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi kategori jasa keuangan dan asuransi ini memang masih memberikan kontribusi yang relatif kecil selama tahun 2012-2016, yaitu di bawah 1 persen. Pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 0,84 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,83 persen. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2012 – 2016 yaitu diatas 8 persen. Pada tahun 2016, kategori ini mengalami sedikit perlambatan menjadi 8,21 persen, setelah tahun sebelumnya mencapai pertumbuhan sebesar 8,63 persen. Sebagaimana beberapa kategori lainnya yang mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun ini, kategori jasa keuangan dan asuransi ini juga mengalami imbas/dampak dari ekonomi global yang juga membaik.

4.12. Kategori L : Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat masih dibawah 2 persen selama tahun 2012 -

2016. Pada tahun 2016 peranannya mencapai 1,70 persen sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,72 persen. Kinerja kategori ini terus mengalami pertumbuhan positif, pada tahun ini mengalami percepatan yaitu dari 5,34 persen menjadi 6,60 persen. Pertumbuhan selama periode 2012 -2016 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan kisaran pertumbuhan antara 4 - 6 persen atas dasar harga konstan 2010.

4.13. Kategori M, N : Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari pada kisaran 0,41 -0,45 persen . Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Laju pertumbuhannya mencapai 8,11 persen pada tahun 2016, mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,55 persen. Namun selama periode 2012 – 2016 pertumbuhan kategori relatif stabil yaitu berkisar 6 – 8 persen.

4.14. Kategori O : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2012 -

2016 peranannya relatif stabil pada kisaran 3 sampai 4 persen. Pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 3,08 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,19 persen.

Laju pertumbuhan relatif stabil pada kisaran 1 – 2 persen, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 2,46 persen menjadi 1,12 persen. Hal tersebut disebabkan terjadinya peningkatan jumlah pegawai negeri di Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan terjadi karena ada pegawai baru dan mutasi dari luar Kabupaten Bandung Barat, sedangkan pegawai yang pensiun dan mutasi keluar tidak berimbang dengan penambahan jumlah pegawai.

4.15. Kategori P : Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016 jasa pendidikan menyumbang sebesar 3,42 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Bandung Barat, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 3,41 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun 2012 -2016 yaitu berturut-turut sebesar 3,21 persen, 3,18 persen, 3,32 persen, 3,41 persen, dan 3,42 persen.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Bandung Barat terus mengalami pertumbuhan negatif selama periode 2012 – 2015 namun menurun pada tahun 2016. Laju pertumbuhan berkisar 9 – 11 persen. Pada tahun 2012 tumbuh sebesar 11,18 persen, sedangkan tahun 2016 hanya mampu tumbuh sebesar 5,85 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya pertumbuhan tahun ini mengalami perlambatan dari 9,79

persen menjadi 5,85 persen. Perkembangan kegiatan pendidikan selain difasilitasi oleh pemerintah, juga sangat didukung oleh keterlibatan pelaku ekonomi swasta yang konsen terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.

4.16. Kategori Q : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,49 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 9,52 persen. Selama tahun 2012 - 2016 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan yaitu pada kisaran 0,42 – 0,49 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi selama periode 2012 – 2016 yaitu 9,03 persen; 9,75 persen; 8,12 persen; 10,91 persen; dan 9,52 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2014 kategori ini sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 8,12 persen. Begitu juga pada tahun 2016 kembali mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 9,52 persen. Dengan pertumbuhan yang positif tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kategori ini cukup stabil cenderung kearah perbaikan.

4.17. Kategori R, S, T, U : Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat relatif kecil yaitu berturut-turut selama periode 2012-2016 sebesar 0 - 1 persen atau berkisar pada 0,95 – 1,03 persen. Pada

tahun 2016 kontribusinya sebesar 1,03 persen sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,00 persen.

Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif, masing-masing yaitu 9,16 persen, 7,84 persen, 8,27 persen, 8,57 persen dan sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi 7,75 persen.

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,596,944.0	4,034,058.2	4,476,093.6	4,642,949.5	5,187,604.0
B	Pertambangan dan Penggalian	344,471.3	382,113.9	416,145.9	438,580.8	450,515.2
C	Industri Pengolahan	9,490,945.5	10,661,263.0	11,996,382.8	13,379,940.7	14,642,303.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	158,945.6	153,265.3	181,746.8	223,918.6	271,412.7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,056.1	10,580.5	10,863.9	12,096.9	13,868.9
F	Konstruksi	1,776,011.5	2,079,514.2	2,363,416.1	2,674,441.7	2,847,880.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,425,043.0	4,016,407.3	4,436,669.3	4,873,887.5	5,247,814.0
H	Transportasi dan Pergudangan	1,148,823.7	1,337,768.1	1,523,022.9	1,832,451.2	1,924,276.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,104,847.2	1,238,258.7	1,406,967.6	1,590,892.2	1,766,768.6
J	Informasi dan Komunikasi	430,345.1	467,354.7	519,044.6	577,696.7	642,327.5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	182,222.2	225,324.3	245,832.4	282,607.8	312,741.4
L	Real Estat	427,471.4	480,895.7	538,042.4	586,473.8	632,120.6
M,N	Jasa Perusahaan	99,795.8	113,999.9	127,835.4	144,698.8	165,082.6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842,711.6	927,007.9	978,988.8	1,085,937.3	1,143,752.2
P	Jasa Pendidikan	774,662.6	870,883.0	1,018,679.1	1,160,878.9	1,269,217.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,316.1	119,064.6	137,221.9	161,457.0	183,034.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	228,725.5	265,204.2	303,043.9	340,712.3	383,398.4
Produk Domestik Regional Bruto		24,144,338.2	27,382,963.5	30,679,997.4	34,009,621.7	37,084,119.0

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,193,260.2	3,322,922.6	3,425,444.8	3,352,645.5	3,543,508.6
B	Pertambangan dan Penggalian	308,184.3	310,164.5	320,282.0	315,157.5	320,578.2
C	Industri Pengolahan	8,594,751.8	9,078,084.0	9,600,667.4	10,148,107.4	10,705,583.8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	170,223.2	181,849.5	196,051.3	202,787.4	215,994.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,375.5	8,948.4	9,056.6	9,539.3	10,066.8
F	Konstruksi	1,500,653.2	1,619,504.9	1,749,551.2	1,881,117.4	1,963,510.4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,017,460.5	3,254,171.4	3,496,196.9	3,676,101.9	3,885,035.9
H	Transportasi dan Pergudangan	1,093,928.9	1,140,006.9	1,187,303.3	1,293,586.5	1,372,061.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	999,903.5	1,076,038.3	1,153,967.3	1,240,160.2	1,328,758.7
J	Informasi dan Komunikasi	411,837.7	445,526.1	489,454.9	549,155.7	609,398.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	164,166.9	182,935.1	194,093.1	210,849.0	228,163.1
L	Real Estat	384,019.9	406,945.9	430,874.3	453,883.0	483,839.3
M,N	Jasa Perusahaan	91,642.0	98,066.1	104,175.6	113,082.4	122,253.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	728,087.5	729,568.3	721,926.5	739,685.9	747,970.4
P	Jasa Pendidikan	684,448.9	756,108.5	832,715.8	914,268.8	967,753.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,314.5	103,509.1	111,914.1	124,120.6	135,936.9
R,S,T,U	Jasa lainnya	206,620.4	222,820.1	241,247.3	261,922.2	282,221.2
Produk Domestik Regional Bruto		21,651,878.9	22,937,169.7	24,264,922.4	25,486,170.7	26,922,633.3

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	ertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.90	14.73	14.59	13.65	13.99
B	Pertambangan dan Penggalian	1.43	1.40	1.36	1.29	1.21
C	Industri Pengolahan	39.31	38.93	39.10	39.34	39.48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.66	0.56	0.59	0.66	0.73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	7.36	7.59	7.70	7.86	7.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.19	14.67	14.46	14.33	14.15
H	Transportasi dan Pergudangan	4.76	4.89	4.96	5.39	5.19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.58	4.52	4.59	4.68	4.76
J	Informasi dan Komunikasi	1.78	1.71	1.69	1.70	1.73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.75	0.82	0.80	0.83	0.84
L	Real Estat	1.77	1.76	1.75	1.72	1.70
M,N	Jasa Perusahaan	0.41	0.42	0.42	0.43	0.45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.49	3.39	3.19	3.19	3.08
P	Jasa Pendidikan	3.21	3.18	3.32	3.41	3.42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.43	0.43	0.45	0.47	0.49
R,S, T,U	Jasa lainnya	0.95	0.97	0.99	1.00	1.03
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.75	14.49	14.12	13.15	13.16
B	Pertambangan dan Penggalian	1.42	1.35	1.32	1.24	1.19
C	Industri Pengolahan	39.70	39.58	39.57	39.82	39.76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.79	0.79	0.81	0.80	0.80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
F	Konstruksi	6.93	7.06	7.21	7.38	7.29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.94	14.19	14.41	14.42	14.43
H	Transportasi dan Pergudangan	5.05	4.97	4.89	5.08	5.10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.62	4.69	4.76	4.87	4.94
J	Informasi dan Komunikasi	1.90	1.94	2.02	2.15	2.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.76	0.80	0.80	0.83	0.85
L	Real Estat	1.77	1.77	1.78	1.78	1.80
M,N	Jasa Perusahaan	0.42	0.43	0.43	0.44	0.45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.36	3.18	2.98	2.90	2.78
P	Jasa Pendidikan	3.16	3.30	3.43	3.59	3.59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.44	0.45	0.46	0.49	0.50
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.95	0.97	0.99	1.03	1.05
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Perumbuhan Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.63	12.15	10.96	3.73	11.73
B	Pertambangan dan Penggalian	8.62	10.93	8.91	5.39	2.72
C	Industri Pengolahan	13.60	12.33	12.52	11.53	9.43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.50	(3.57)	18.58	23.20	21.21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.66	16.83	2.68	11.35	14.65
F	Konstruksi	19.68	17.09	13.65	13.16	6.49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.09	17.27	10.46	9.85	7.67
H	Transportasi dan Pergudangan	4.94	16.45	13.85	20.32	5.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14.42	12.08	13.62	13.07	11.06
J	Informasi dan Komunikasi	9.45	8.60	11.06	11.30	11.19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15.14	23.65	9.10	14.96	10.66
L	Real Estat	10.43	12.50	11.88	9.00	7.78
M,N	Jasa Perusahaan	13.16	14.23	12.14	13.19	14.09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.70	10.00	5.61	10.92	5.32
P	Jasa Pendidikan	21.68	12.42	16.97	13.96	9.33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.58	15.24	15.25	17.66	13.36
R,S,T,U	Jasa lainnya	12.30	15.95	14.27	12.43	12.53
Produk Domestik Regional Bruto		13.16	13.41	12.04	10.85	9.04

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.95	4.06	3.09	(2.13)	5.69
B	Pertambangan dan Penggalian	1.75	0.64	3.26	(1.60)	1.72
C	Industri Pengolahan	6.26	5.62	5.76	5.70	5.49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.02	6.83	7.81	3.44	6.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.71	6.84	1.21	5.33	5.53
F	Konstruksi	9.25	7.92	8.03	7.52	4.38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.24	7.84	7.44	5.15	5.68
H	Transportasi dan Pergudangan	4.21	4.21	4.15	8.95	6.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.89	7.61	7.24	7.47	7.14
J	Informasi dan Komunikasi	5.83	8.18	9.86	12.20	10.97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.09	11.43	6.10	8.63	8.21
L	Real Estat	4.83	5.97	5.88	5.34	6.60
M,N	Jasa Perusahaan	6.96	7.01	6.23	8.55	8.11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.83	0.20	(1.05)	2.46	1.12
P	Jasa Pendidikan	11.18	10.47	10.13	9.79	5.85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.03	9.75	8.12	10.91	9.52
R,S,T,U	Jasa lainnya	9.16	7.84	8.27	8.57	7.75
Produk Domestik Regional Bruto		6.04	5.94	5.79	5.03	5.64

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	113.63	127.44	141.41	146.68	163.89
B	Pertambangan dan Penggalian	121.44	134.71	146.71	154.62	158.83
C	Industri Pengolahan	126.07	141.62	159.35	177.73	194.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	105.96	102.18	121.16	149.28	180.94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	123.27	144.02	147.88	164.66	188.78
F	Konstruksi	139.07	162.84	185.07	209.42	223.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	131.59	154.31	170.45	187.25	201.61
H	Transportasi dan Pergudangan	113.30	131.94	150.21	180.73	189.78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	129.03	144.61	164.31	185.79	206.33
J	Informasi dan Komunikasi	119.61	129.90	144.27	160.57	178.53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	131.96	163.18	178.03	204.66	226.49
L	Real Estat	123.03	138.40	154.85	168.79	181.93
M,N	Jasa Perusahaan	124.90	142.68	159.99	181.10	206.61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	121.17	133.30	140.77	156.15	164.46
P	Jasa Pendidikan	137.80	154.91	181.20	206.50	225.77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129.97	149.78	172.63	203.11	230.26
R,S,T,U	Jasa lainnya	130.61	151.44	173.05	194.56	218.94
Produk Domestik Regional Bruto		124.96	141.72	158.78	176.01	191.93

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100.88	104.98	108.22	105.92	111.95
B	Pertambangan dan Penggalian	108.65	109.35	112.91	111.11	113.02
C	Industri Pengolahan	114.17	120.59	127.53	134.80	142.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	113.48	121.23	130.70	135.19	143.99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	114.01	121.81	123.28	129.85	137.03
F	Konstruksi	117.51	126.82	137.00	147.30	153.75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	115.93	125.02	134.32	141.23	149.26
H	Transportasi dan Pergudangan	107.89	112.43	117.10	127.58	135.32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116.77	125.66	134.76	144.83	155.17
J	Informasi dan Komunikasi	114.47	123.83	136.04	152.64	169.38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	118.89	132.48	140.56	152.70	165.23
L	Real Estat	110.52	117.12	124.01	130.63	139.25
M,N	Jasa Perusahaan	114.69	122.73	130.38	141.53	153.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	104.69	104.91	103.81	106.36	107.55
P	Jasa Pendidikan	121.75	134.50	148.12	162.63	172.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118.65	130.22	140.79	156.14	171.01
R,S,T,U	Jasa lainnya	117.99	127.24	137.76	149.57	161.16
Produk Domestik Regional Bruto		112.06	118.71	125.58	131.90	139.34

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	112.64	121.40	130.67	138.49	146.40
B	Pertambangan dan Penggalian	111.77	123.20	129.93	139.16	140.53
C	Industri Pengolahan	110.43	117.44	124.95	131.85	136.77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93.37	84.28	92.70	110.42	125.66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	108.13	118.24	119.96	126.81	137.77
F	Konstruksi	118.35	128.40	135.09	142.17	145.04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	113.51	123.42	126.90	132.58	135.08
H	Transportasi dan Pergudangan	105.02	117.35	128.28	141.66	140.25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110.50	115.08	121.92	128.28	132.96
J	Informasi dan Komunikasi	104.49	104.90	106.05	105.20	105.40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	111.00	123.17	126.66	134.03	137.07
L	Real Estat	111.31	118.17	124.87	129.21	130.65
M,N	Jasa Perusahaan	108.90	116.25	122.71	127.96	135.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	115.74	127.06	135.61	146.81	152.91
P	Jasa Pendidikan	113.18	115.18	122.33	126.97	131.15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.54	115.03	122.61	130.08	134.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	110.70	119.02	125.62	130.08	135.85
Produk Domestik Regional Bruto		111.51	119.38	126.44	133.44	137.74

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat, Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.55	7.78	7.64	5.98	5.71
B	Pertambangan dan Penggalian	6.75	10.22	5.47	7.10	0.98
C	Industri Pengolahan	6.90	6.35	6.40	5.52	3.74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(6.09)	(9.74)	9.99	19.11	13.80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.70	9.35	1.45	5.72	8.64
F	Konstruksi	9.55	8.50	5.20	5.25	2.02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.18	8.74	2.82	4.48	1.88
H	Transportasi dan Pergudangan	0.70	11.74	9.31	10.43	(0.99)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.06	4.15	5.95	5.21	3.65
J	Informasi dan Komunikasi	3.42	0.39	1.09	(0.80)	0.20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.55	10.97	2.83	5.82	2.27
L	Real Estat	5.34	6.16	5.67	3.48	1.11
M,N	Jasa Perusahaan	5.80	6.75	5.56	4.28	5.53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.66	9.78	6.73	8.26	4.16
p	Jasa Pendidikan	9.45	1.77	6.21	3.79	3.29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.09	5.01	6.59	6.09	3.51
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.88	7.52	5.54	3.56	4.43
Produk Domestik Regional Bruto		6.71	7.06	5.91	5.54	3.22

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat***

*Jalan Raya Padalarang No. 763 Padalarang, Bandung Barat 40553
Telp. (022) 680 4400, Faks. (022) 680 4411, Email : bps3217@bps.go.id*